



2024

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI / RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayahNya, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk kurun waktu tahun 2024 telah selesai disusun.

Penekanan dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini adalah pada pencapaian sasaran prioritas Indikator Kinerja Utama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta outcome program, Kegiatan dan output sub kegiatan.

Akhirnya Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, 4 Juli 2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai**



dr. SYAIFUL M.K.M
NIP. 19710724 200112 1 004

DAFTAR ISI

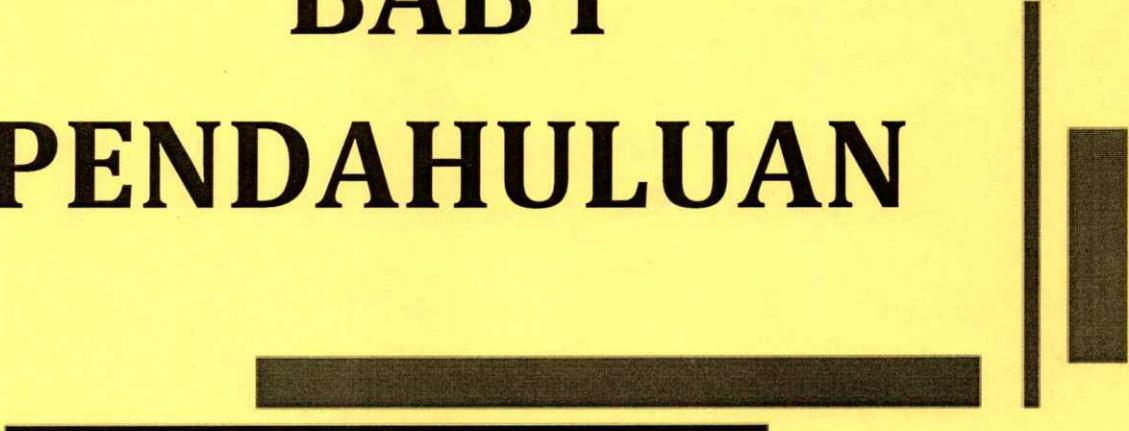
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.....	5
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
2.2 Susunan Organisasi	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	8
3.1 Tujuan dan Sasaran Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024.....	8
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI / RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2	10
4.1 Evaluasi Rencana Aksi.....	10
4.2 Penilaian	20
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II tahun 2024	21
4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	24
BAB V PENUTUP.....	42
5.1 Kaidah Pelaksanaan	43
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	44

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan sebagai upaya untuk menjabarkan Rencana program kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 105).
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019- 2024:
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai,
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E):

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 5 Seri D),
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.
19. Dokumen Rancangan Awal RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indicator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi /Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
- BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN menjelaskan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN menjelaskan tentang keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024
- BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN TRIWULAN II TAHUN 2024. Menjelaskan tentang Evaluasi Rencana Aksi, Penilaian, Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan (Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II tahun 2024, dan Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II tahun 2024.
- BAB V PENUTUP



BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kota Dumai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Dalam perjalanannya Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai telah empat kali mengalami perubahan, dan yang terkini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

2.1. Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

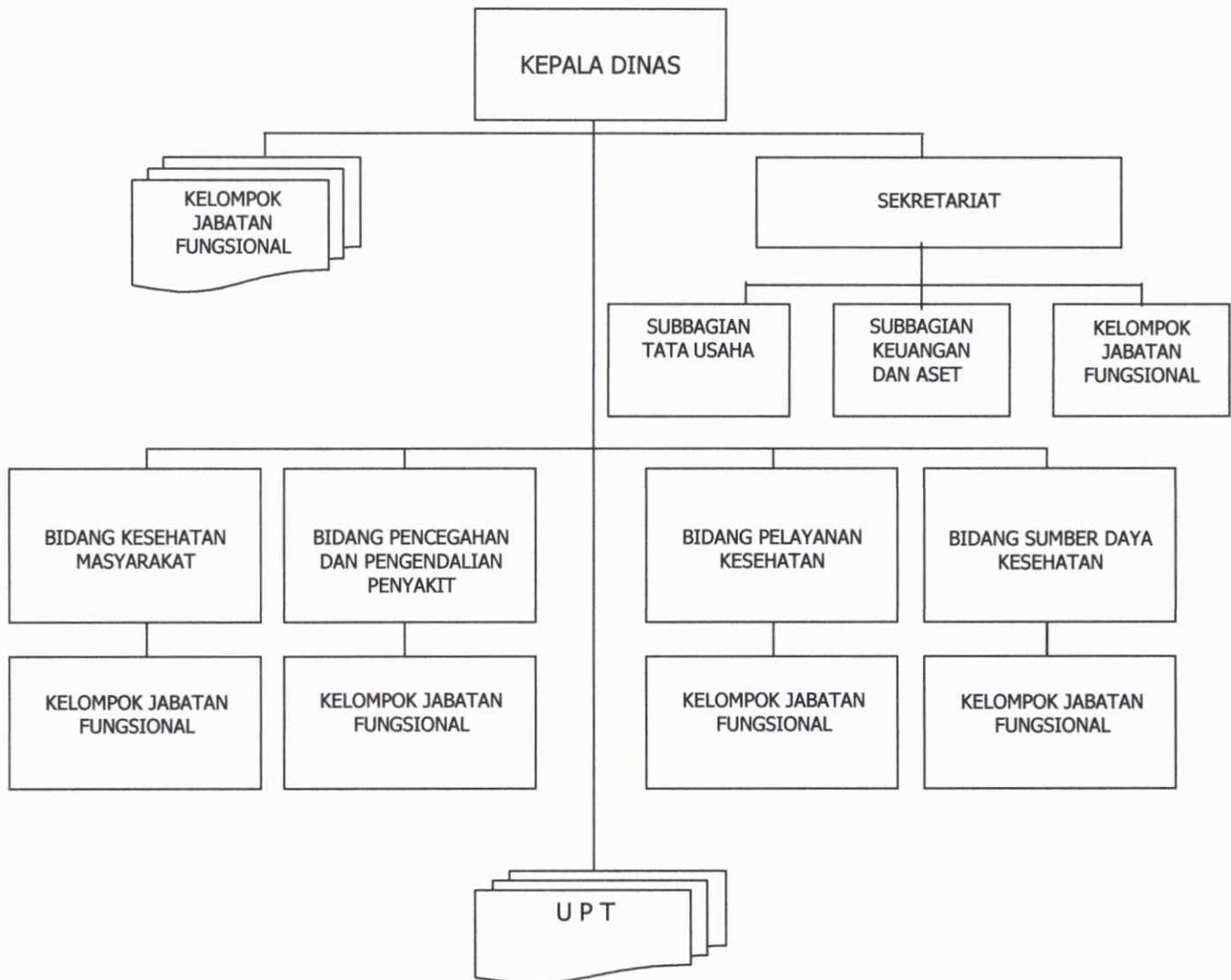
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 tahun 2018 yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Dumai
 - a. UPT Puskesmas
 - b. UPT RSUD Kota Dumai
 - c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - d. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai





BAB III
TUJUAN SAN SASARAN



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Aksi Tahun 2024

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Dumai, dengan sasaran kesehatan secara Continuum of Care (dari lahir hingga lansia).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 maka dirumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis PD Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai" yang tertuang dalam Misi 2 RPJMD Kota Dumai (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu), akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indek kesehatan	0.784	0.788	0.789 – 0,790	0.790 – 0,791	0.790 – 0,791	0.791 – 0,792	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04 tahun	71.25 tahun	71,29 – 71,33 tahun	71,34 – 71,37 tahun	71,38 – 71,42 tahun	71,42 – 71,46 tahun
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92	92.2	97.0	100	100	100



BAB IV

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**

4.1. Evaluasi Rencana Aksi

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

Evaluasi Pelaksanaan program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA) Dinas Kesehatan Triwulan II tahun 2024 ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai standar bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024.

Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama(IKU)	Satuan	Target	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8/1.000 KH
		2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11/1.000 KH
		3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100,5/100.000 KH
		4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,34-71,37 Thn
		5	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1/1.000 Penduduk
		6	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB	%	88%
		7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1%
		8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 Penduduk	54/100.000 Penduduk
		9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1%
		10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100%

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terdiri dari Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Permendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang : Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 terdiri dari : Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari 5 program, 24 kegiatan dan 109 sub kegiatan dengan perincian : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 sub kegiatan, dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 67 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 1.1.7 Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- 1.2.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - 1.3.2 Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (*).
 - 1.4.2 Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - 1.4.3 Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.5.3 Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 1.5.4 Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.5.5 Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.5.6 Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.5.7 Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.5.8 Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 *Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan*

- 1.6.2 Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 1.6.3 Sub kegiatan Pengadaan mebel
- 1.6.4 Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
 - 1.7.2 Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 1.9 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.9.1 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota
 - 1.9.2 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat
 - 1.9.3 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur
 - 1.9.4 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan
 - 1.9.5 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai
 - 1.9.6 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu
 - 1.9.7 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah
 - 1.9.8 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti

- 1.9.9 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama
- 1.9.10 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur
- 1.9.11 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas
 - 1.1.2. Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.3. Sub kegiatan Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
 - 1.1.4. Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - 1.1.5. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.1.7. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.8. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
 - 1.1.9. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.10. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 1.1.11. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.12. Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

- 1.1.13. Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 1.1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1.1.2. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1.1.3. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1.1.4. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1.1.5. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1.1.6. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1.1.7. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1.1.8. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 1.1.9. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 1.1.10. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 1.1.11. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1.1.12. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 1.1.13. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 1.1.14. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana*

- 1.1.15. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 1.1.16. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*
- 1.1.17. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 1.1.18. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.1.19. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.1.20. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).*
- 1.1.21. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
- 1.1.22. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.1.23. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.1.24. Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
- 1.1.25. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 1.1.26. Sub kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*
- 1.1.27. Sub kegiatan Operasional pelayanan puskesmas
- 1.1.28. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.1.29. Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*
- 1.1.30. Sub kegiatan Investigasi awal kejadian tidak diharapkan Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
- 1.1.31. Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 1.1.32. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga*

- 1.1.33. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis
- 1.1.34. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
- 1.1.35. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 1.1.36. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi
- 1.1.37. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1.2.1. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 1.3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 1.3.2. Sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.3. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 1.3.4. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 2.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 - 2.2.2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis SDM tingkat daerah Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

3.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

3.1.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

3.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

3.2.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

3.3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

3.3.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

3.4. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

3.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra

Makanan Jajanan

3.5. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

3.5.1. Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

4.3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.2. Penilaian

Penilaian terhadap Evaluasi rencana aksi ini dilakukan sebagai berikut :

- ❖ Penilaian periodik menggunakan form e-monev excel dari Bappeda yang disampaikan per triwulan.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II tahun 2024.

Pada tahun 2024 dana alokasi murni untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp. 131.447.444.490,-. Kemudian setelah mendapat dana tambahan Dana DAK Non Fisik (BOK) dan DAK Fisik Dinkes Kota Dumai, jumlah dana menjadi **Rp. 211.634.198.032,-**. Penambahan dana pada alokasi perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai disebabkan karena adanya tambahan dana DAK 2024 Fisik dan non Fisik serta pindahnya dana gaji RSUD dr. Suhatman, MARS Dumai.

Dana alokasi murni untuk UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai sebesar Rp. 14.895.718.110,- dan ditambah dengan dana BOK untuk UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai sebesar 6.988.838.000,- sehingga jumlah dana menjadi Rp. **21.884.556.110,**

Kemudian dana alokasi murni untuk Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp. 188.640.000,-. Sehingga total dana untuk 10 Puskesmas se-Kota Dumai dan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar **Rp. 22.073.196.110,-**. Dengan demikian total keseluruhan dana Dinas Kesehatan Kota Dumai, UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar **Rp. 233.707.394.142,-**

Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi jumlah serapan dana dari keseluruhan dana Dinas Kesehatan Kota Dumai, UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar 36,89% yaitu Rp. 86.217.797.905,- dari **Rp. 233.707.394.142,-**.

Anggaran Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan dialokasikan ke dalam 5 program (terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan 4 program urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), dan 23 kegiatan terdiri dari 9 kegiatan penunjang

urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan 14 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), serta 91 sub kegiatan (39 sub kegiatan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan 52 sub kegiatan wajib).

Alokasi Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan Triwulan II Kota Dumai sebesar Rp. 211.634.198.032,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 76.413.014.780,- atau 36,11%, meliputi :

- ❖ Anggaran Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 143.640.439.875 dengan serapan Rp. 54.745.493.891 atau 38,11 %
- ❖ Anggaran Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 57.678.612.032,- dengan serapan Rp. 18.558.125.996,- atau 32,18 %.
- ❖ Anggaran Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp. 8.824.986.000,- dengan serapan Rp. 2.796.288.120,- atau 31,69%.
- ❖ Anggaran Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp. 978.517.100,- dengan serapan Rp. 233.046.000,- atau 23,82%.
- ❖ Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp. 511.643.025,- dengan serapan Rp. 80.060.773,- atau 15,65%.

Pencapaian realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pencapaian Realisasi keuangan Berdasarkan Program
 Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW II	%
	SEMUA BIDANG			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	143.640.439.875	54.745.493.891	38,11
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.678.612.032	18.558.125.996	32,18
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.824.986.000	2.796.288.120	31,69
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	978.517.100	233.046.000	23,82
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	511.643.025	80.060.773	15,65
	JUMLAH	211.634.198.032	76.413.014.780	36,11

Berdasarkan unit kerja, anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp.211.634.198.032,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 76.413.014.780,- atau 36,11%, anggaran BLUD Puskesmas (10 Puskesmas) sebesar Rp. 21.884.556.110,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.729.496.828,- atau 44,46%, dan anggaran Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan kualitas air Kelas A sebesar Rp. 188.640.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 75.286.297,- (39,91%) sehingga serapan anggaran 10 puskesmas di kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan kualitas air Kelas A, yaitu 9.804.783.125,- dari total dana Rp. 22.073.196.110,- (44,42%).

Dari 10 Puskesmas di Kota Dumai, realisasi anggaran yang paling rendah yaitu pada BLUD puskesmas Jaya Mukti sebesar Rp. 3.570.229.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.305.269.783,- atau 36,56%, dan realisasi

anggaran yang terbesar yaitu pada BLUD Puskesmas Dumai Barat sebesar Rp. 1.876.692.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.083.577.781,- atau 57,74%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN			REALISASI TW II	% CAPAI AN
		BLUD	BOK	TOTAL DANA		
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.804.279.500	948.428.000	2.752.707.500	1.051.152.210	38,19
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.331.000.000	545.692.000	1.876.692.000	1.083.577.781	57,74
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.450.000.000	581.361.000	2.031.361.000	921.300.244	45,35
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2.454.374.960	821.961.000	3.276.335.960	1.733.074.149	52,90
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	922.500.000	545.082.000	1.467.582.000	722.316.695	49,22
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.111.875.000	744.840.000	1.856.715.000	826.763.253	44,53
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	609.500.000	531.249.000	1.140.749.000	485.020.726	42,52
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2.461.150.000	1.109.079.000	3.570.229.000	1.305.269.783	36,56
9	BLUD Puskesmas Purnama	1.110.500.000	530.611.000	1.641.111.000	717.964.318	43,75
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.640.538.650	630.535.000	2.271.073.650	883.057.669	38,88
11	BLUD Lab Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	188.640.000		188.640.000	75.286.297	39,91
	TOTAL	15.084.358.110	6.988.838.000	22.073.196.110	9.804.783.125	44,42

4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Bab II.b

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian kinerja	Kategori Nilai
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8	2,62	100	Sangat Tinggi
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11	3,88	100	Sangat Tinggi
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100,5	31,46	100	Sangat Tinggi
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,34-71,37	71,67	100	Sangat Tinggi
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	66,32	66,32	Sedang
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1	0,02	100	Sangat Tinggi
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	68,30	77,61	Tinggi
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1	0.17	100	Sangat Tinggi
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	54	114.67	- 12,35	Sangat Rendah
		3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	99,75	99,75	Sangat Tinggi
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0,06	100	Sangat Tinggi
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi kurang	%	2	0,98	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100	99,26	99,26	Sangat Tinggi

Berdasarkan data diatas, secara umum Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 ini. Dari 11 indikator IKU, ada sebanyak 9 IKU yang nilai pencapaian kinerjanya sangat tinggi (>90%), yaitu Angka Kematian Bayi per 1.000 KH, Angka Kematian Balita per 1.000 KH, Angka Kematian Ibu per 100.000 KH, Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk, Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko, Persentase Balita dengan Gizi Buruk, Persentase Balita dengan Gizi kurang dan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selanjutnya ada 1 IKU yang nilai pencapaian kinerjanya tinggi (76-90%) yaitu Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + (77,61%). Namun masih ada sebanyak 1 IKU yang nilai pencapaian kinerjanya sangat rendah yaitu Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD) dengan persentase pencapaian kinerja – **12,35%**.

IKU yang pencapaian kinerjanya sangat rendah tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat dampak pasca pandemik Covid 19 bahwa mobilitas penduduk kembali tinggi. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid 19 di Indonesia, maka penetapan status bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional secara resmi dicabut. Disamping itu, potensi kota Dumai sebagai kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, sebagai daerah transit baik dalam negeri maupun luar negeri, tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit DBD yang berdampak pada tidak tercapainya IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut.

Rincian capaian kinerja masing masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada Triwulan II tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 25 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 2,62 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana angka kematian bayi sebesar 11,36 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi mengalami penurunan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ini. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 8 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Provinsi Riau sebesar 21 per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 17.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Provinsi Riau dan Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat, pada Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,62, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

Grafik 4.6
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



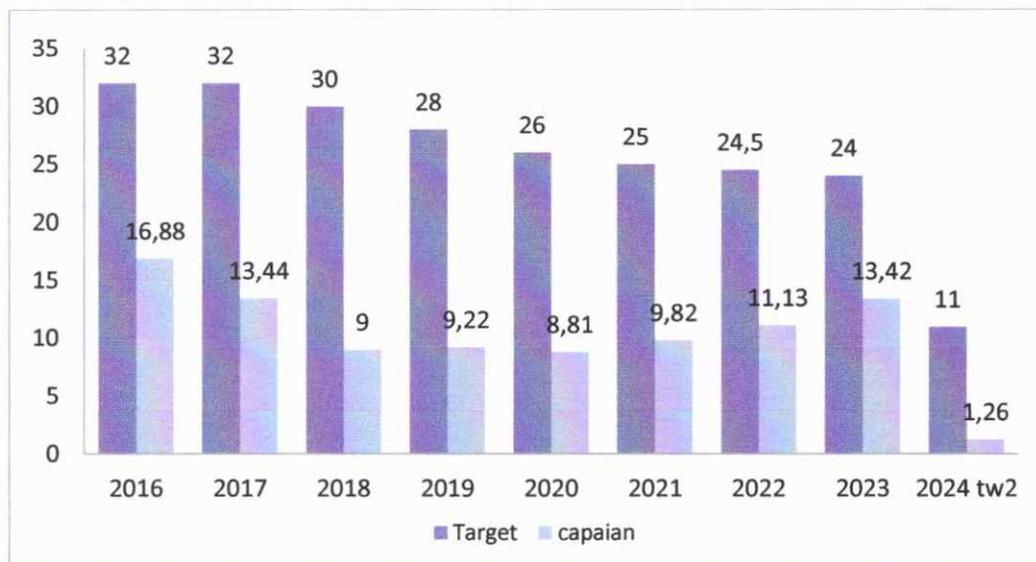
Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 12 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2024 Triwulan II di Kota Dumai sebesar 1,26 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana angka kematian balita sebesar 13,42, maka angka tersebut mengalami penurunan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 11 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat dan sampai dengan Triwulan II tahun 2024

terjadi penurunan sebesar 1,26 per 1000 kelahiran hidup, seperti terlihat pada grafik 4.7 berikut ini :

Grafik 4.7
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



Angka Kematian Ibu

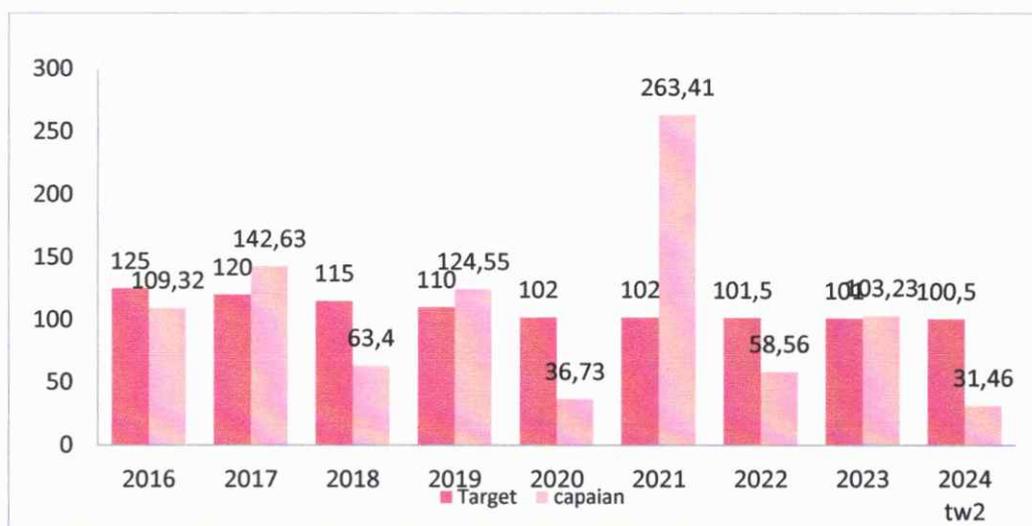
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 3 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2024 Triwulan II di Kota Dumai sebesar 31.46 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 100,5 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 % (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana angka kematian ibu sebesar 103,23, maka terlihat adanya penurunan angka kematian ibu sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 100,5 per 100.000

kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih dibawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai berada di atas Target Nasional.

Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2020, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2023, kemudian menurun pada Triwulan II tahun 2024, seperti terlihat grafik 4.8 berikut ini :

Grafik 4.8
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai Dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



Umur Harapan Hidup

Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,34-71,37 tahun, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,67 tahun atau 100%. Dengan demikian persentase capaian kinerja

adalah sebesar 100% (sangat tinggi). Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan peningkatan dapat di lihat pada grafik 4.9 berikut ini :

Grafik 4.9
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai Dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

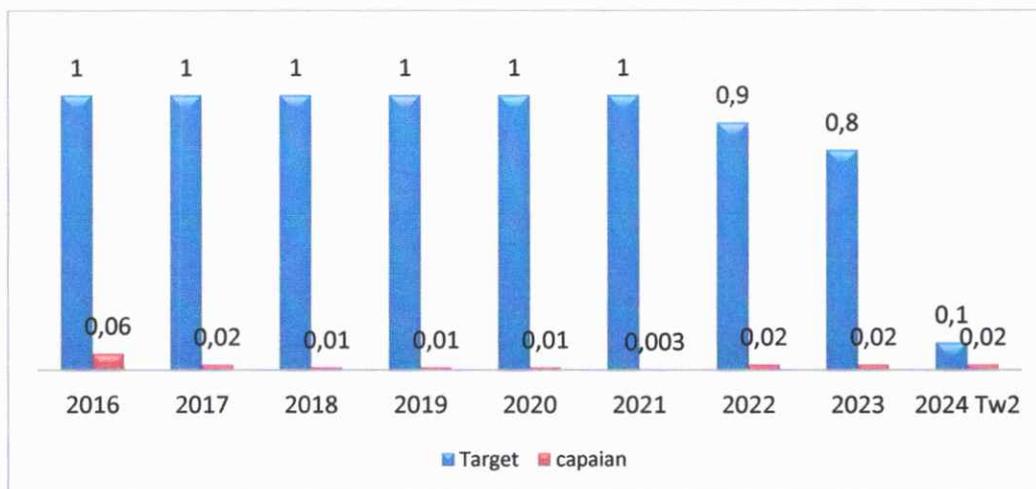
Angka Kesakitan Malaria

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Angka *Annual Parasite Incidence* (API) ditemukan sebanyak 6 kasus positif malaria yaitu 0,017 per 1000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk, maka angka *Annual Parasite Incidence* (API) tersebut mengalami penurunan. Kemudian bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 0,1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas.

Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung statis, kemudian menurun mulai

tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2024 ini. Pada Triwulan II tahun 2024 terdapat 6 kasus positif malaria yaitu 0,02 per 1000 penduduk. Seperti terlihat pada grafik 4.10 dibawah ini :

Grafik 4.10
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai Dari tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



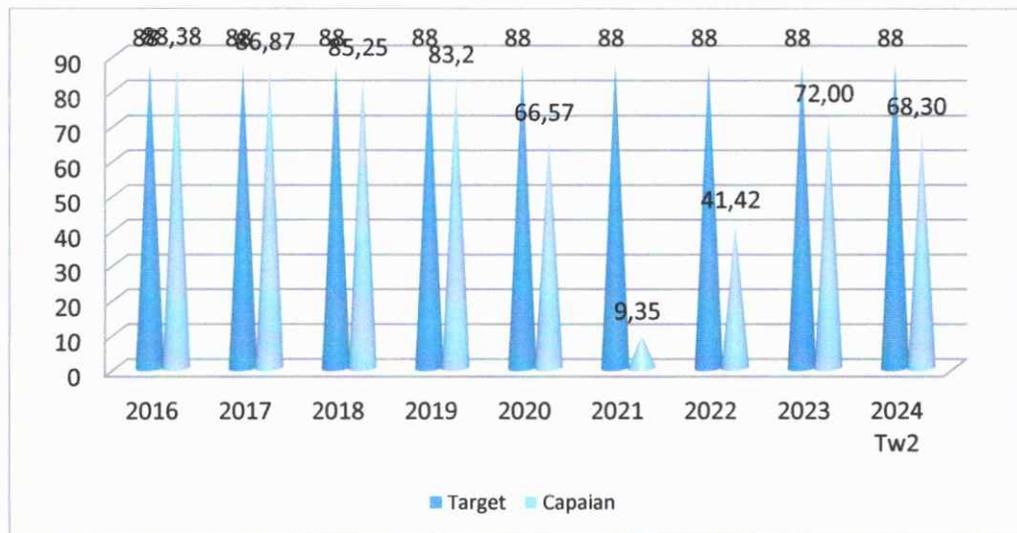
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pencapaian angka kesembuhan TB Paru BTA + tahun 2024 Triwulan II sebesar 68,30% dimana terdapat 334 penderita TB paru yang sembuh dari 489 penderita TB terkonfirmasi bakteriologis yang dievaluasi, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2024 belum mencapai target. Dengan demikian angka kesembuhan TB Paru BTA + tahun 2024 Triwulan II sebesar 68,30% dengan persentase capaian kinerja adalah sebesar 78% (tinggi). Pencapaian kinerja tersebut kurang dari target 88%, sehingga persentase capaian kinerja adalah tinggi.

Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2016 sampai dengan 2024 Triwulan 2 berfluktuasi. Pada tahun 2016 angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ sudah melebihi target Kota Dumai, namun mulai tahun 2017 menunjukkan penurunan dan

mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Mulai tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terjadi peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+, dan pada triwulan II tahun 2024 kembali menurun yaitu dengan capaian sebesar **68,30%**, seperti terlihat pada grafik 4.11 berikut ini :

Grafik 4.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di kota Dumai sebanyak 386 kasus. Dengan demikian, prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 221.241 orang) pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 0,17%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2024 yaitu sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi)

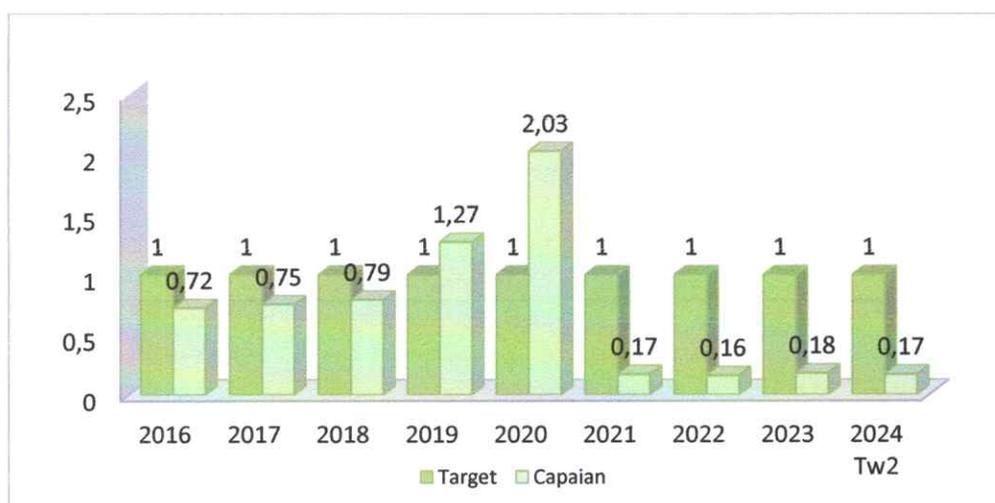
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,18%, maka pencapaian angka prevalensi sampai dengan Triwulan II tahun

Dumai pada tahun 2024 yaitu sebesar <1%, maka pencapaian kinerja tersebut masih dibawah target yaitu 100% (sangat tinggi).

Melihat potensi kota Dumai sebagai kota Industri dan Pelabuhan, yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya wisatawan asing maupun pelaut asing, serta adanya mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki prevalensi HIV yang cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta kepulauan Riau, maka kasus HIV dapat semakin meningkat dan menjadi permasalahan kesehatan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko di Kota Dumai masih rendah atau dibawah target, hal tersebut perlu diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kemudian terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2021 dan cenderung statis hingga tahun 2023, kemudian meningkat sampai dengan Triwulan II tahun 2024 seperti terlihat pada grafik 4.12 berikut ini :

Grafik 4.12
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024



Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis DBD. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dikota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 394 kasus atau IR = sebesar 114,67 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 2 orang. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD) pada tahun 2024 adalah sebesar 54 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar -12,35 (sangat rendah).

Masih ditemukannya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti \pm 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 menunjukan fluktuasi dimana mengalami peningkatan yang signifikan (mencapai puncak) pada tahun 2019, namun mengalami penurunan mulai tahun 2020 dan meningkat signifikan tahun 2023 yaitu sebesar 195,94 per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 657 penderita dengan kematian sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan kasus DBD dimana pada Triwulan II jumlah kasus DBD sebanyak 394 penderita sebesar 114,669 per 100.000 penduduk dengan jumlah kematian sebanyak 2 kasus seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini:

Grafik 4.13
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai
dari tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016,

optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk.

Jumlah kasus gizi buruk di kota Dumai pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 12 kasus atau sebesar 0,06 %. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2024 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa Persentase Balita Dengan Gizi Buruk cenderung statis kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan tahun 2023 kembali menurun sampai Triwulan II tahun 2024, seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini:

Grafik 4.14
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya

cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 212 penderita dari 19.064 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 1,10%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Pada Triwulan II tahun 2024 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 206 penderita dari 20.967 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 0,98 %. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2024 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Pencapaian persentase balita dengan gizi kurang Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi kurang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 212 atau 1,10% dan pada Triwulan II tahun 2024 terjadi penurunan yaitu 206 atau sebesar 0,98 %. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi), seperti terlihat pada grafik 4.15 berikut ini:

Grafik 4.15
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai
dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Peserta JKN terdiri dari:

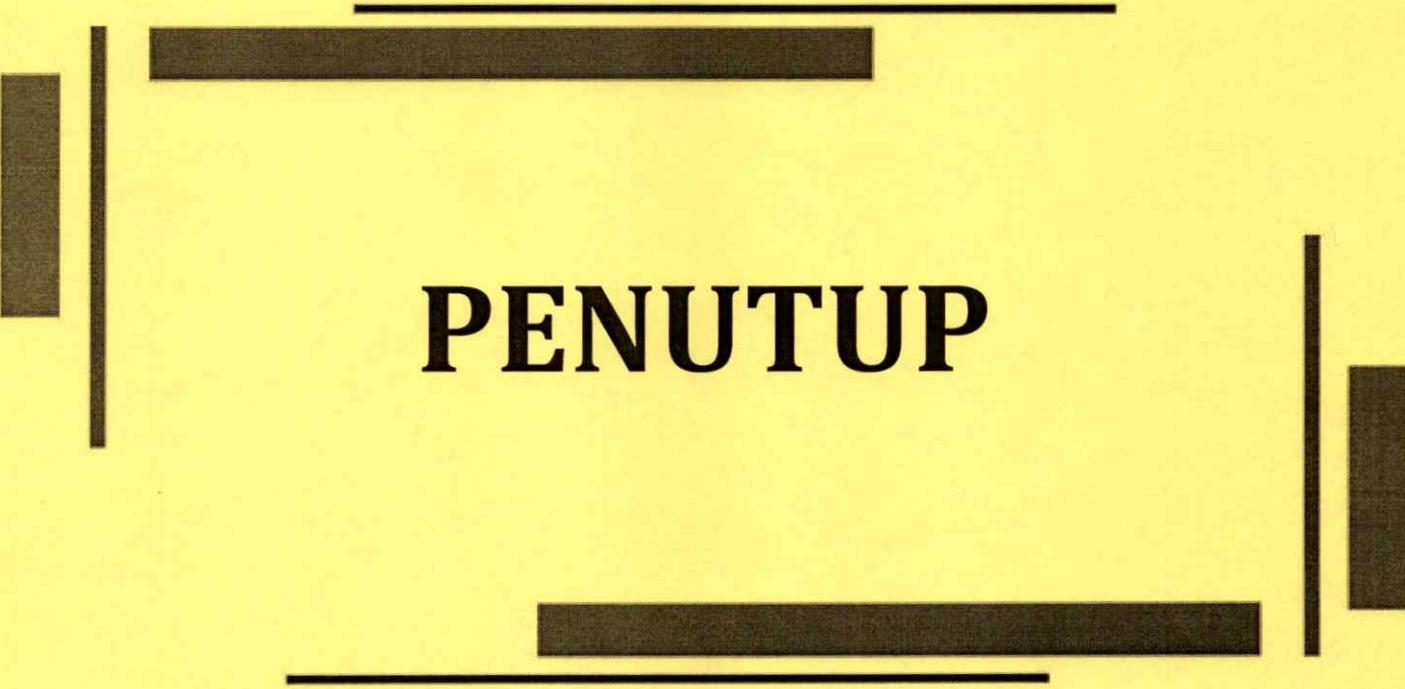
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Peserta JKN kota Dumai tahun 2023 mencapai 338.131 dari 338.064 target. Target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai untuk tahun 2023 sebesar 97 dan persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100.02%.

Pada Triwulan II tahun 2024 peserta JKN kota Dumai mencapai 341.044 dari 343.957, sehingga realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 97.61%, maka pencapaian kinerjanya memuaskan yaitu mencapai 99.26%. Pencapaian cakupan JKN kota Dumai cenderung stabil dari tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun 2024, seperti terlihat pada grafik 4.16 berikut ini :

Grafik 4.16
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai
Tahun 2016 sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024





PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program- program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Dengan disusunnya Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 diharapkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program kegiatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan.

Demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 ini kami susun sebagai laporan dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 memuat lampiran formulir yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mencantumkan target pelaksanaan indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
2. Kepala Dinas, sekretaris, Kabid dan sub koordinator berkewajiban untuk membuat target pelaksanaan indikator sasaran, outcome dan kegiatan berdasarkan Planning of action (POA) yg telah dibuat agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
3. Sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Memastikan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024 dapat berjalan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan pertriwulan.

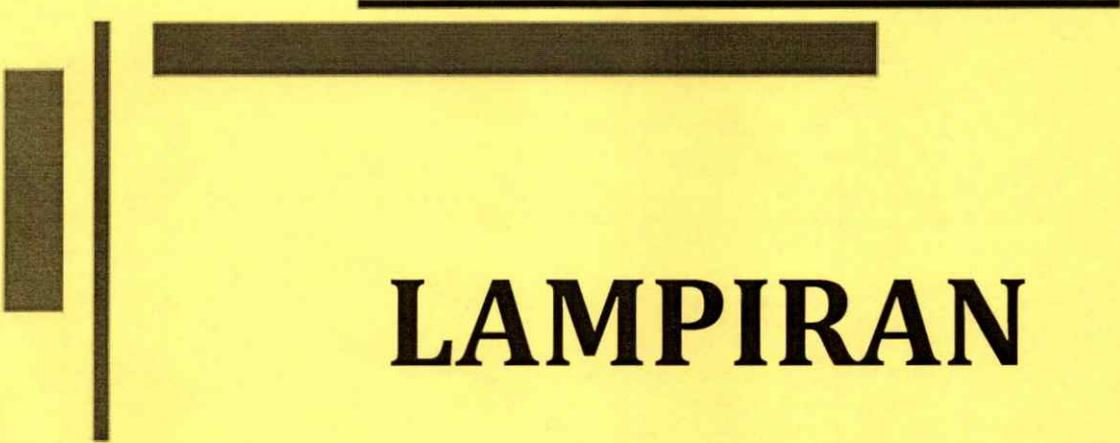
Dumai, 04 Juli 2024

Kepala Dinas
Kesehatan Kota Dumai

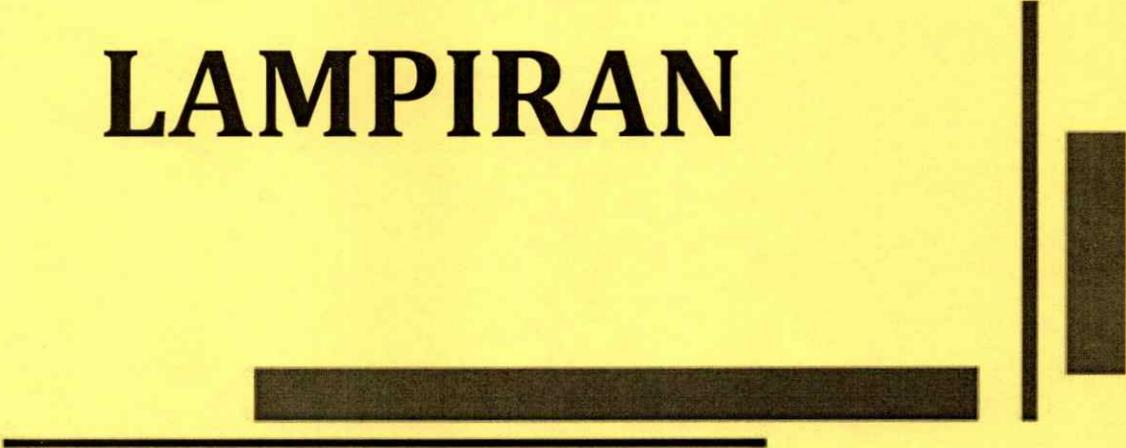


dr. SYAIFUL MKM

NIP. 19710724 200112 1 00



LAMPIRAN



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
s.d JUNI
Dinas Kesehatan

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																										
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	%	143.640.439.875		22.894.813.164	31.850.680.727	-	-	-	54.745.493.891	0,00%	38,11%	54.745.493.891	0,00%	DINAS KESEHATAN						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			28	Dokumen	232.376.700		7.985.600	21.436.420	-	-	-	29.422.020,00	0,00%	12,66%	29.422.020	0,00%							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			9	Dokumen	137.472.400	5	7.985.600	21.436.420			5	29.422.020	55,56%	21,40%	29.422.020	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			2	Dokumen	22.972.000							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			2	Dokumen	5.141.000							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			2	Dokumen	1.781.000							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			2	Dokumen	1.781.000							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			4	Laporan	19.709.200							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			9	Laporan	43.520.100							-	0,00%	0,00%	-	0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			4	Dokumen	135.208.979.600		21.846.048.285	29.848.428.464	-	-	-	51.694.476.749	0,00%	38,23%	51.694.476.749	0,00%							

No	Sesaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 8 + 12				15=14/8 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	600	org/bulan	135.156.929.600	600	21.846.048.285	29.806.653.484					600	51.652.701.749	100%	38,22%	51.652.701.749	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	2	Laporan	53.050.000			41.775.000					-	41.775.000	0,00%	78,75%	41.775.000	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	3	Laporan	28.400.000			16.000.000					-	16.000.000	0,00%	58,34%	16.000.000	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	-	2	Dokumen	13.400.000			8.800.000					-	8.800.000	0,00%	65,67%	8.800.000	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-	-	2	Laporan	15.000.000			7.200.000					-	7.200.000	0,00%	48,00%	7.200.000	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	100	org	332.622.310		22.535.000	180.838.800					-	183.073.600	0,00%	55,04%	183.073.600	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelitian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	-	1	Dokumen	160.166.770		22.535.000	37.950.000					-	60.485.000	0,00%	36,40%	60.485.000	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsional	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	9	Orang	186.455.540			122.568.600					-	122.568.600	0,00%	73,85%	122.568.600	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12	Bulan	964.256.932		127.826.618	489.916.628					-	617.737.246	0,00%	64,06%	617.737.246	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	1	paket	16.797.900			6.059.100					-	6.059.100	0,00%	32,23%	6.059.100	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	3	paket	277.753.700			261.817.500					-	261.817.500	0,00%	94,26%	261.817.500	0,00%			

No	Sesaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triliun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
							I		II		III		IV			12		13=12/7x100%		14 = 5 + 12				15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			3 paket	20.105.000					19.483.000					19.483.000	0,00%	96,91%			19.483.000	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			2 paket	55.385.000		7.840.000			29.320.000					37.160.000	0,00%	67,08%			37.160.000	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			3 paket	59.995.532					47.100.600					47.100.600	0,00%	78,51%			47.100.600	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 Dokumen	3.000.000					885.000					885.000	0,00%	29,50%			885.000	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 Laporan	473.529.800		119.998.818			125.245.428					245.232.046	0,00%	51,79%			245.232.046	0,00%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	55.880.000											0,00%	0,00%				0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			24 Unit	280.000.000											0,00%	0,00%				0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			20 Unit	150.000.000											0,00%	0,00%				0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			12 Unit	100.000.000											0,00%	0,00%				0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			3 Laporan	5.674.240.000		918.070.349			1.184.261.578					1.999.331.925	0,00%	35,87%			1.999.331.925	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			1 Laporan	379.800.000		74.430.349			97.671.578					172.101.925	0,00%	45,34%			172.101.925	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 Laporan	458.640.000		72.540.000			95.490.000					168.030.600	0,00%	36,54%			168.030.600	0,00%		

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					7		8				9				12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1	Laporan	4.736.000.000	668.100.000	991.100.000					-	1.659.200.000	0,00%	35,03%	1.659.200.000	0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			100	Unit	1.049.564.333	75.347.312	130.105.039					-	205.452.351	0,00%	19,58%	205.452.351	0,00%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			18	Unit	639.563.500	75.347.312	130.105.039					-	205.452.351	0,00%	32,12%	205.452.351	0,00%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1	Unit	410.000.833							-		0,00%	0,00%		0,00%						
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			82	%	57.678.612.032	2.631.332.678	15.926.793.318					-	18.558.125.996,00	0,00%	32,18%	18.558.125.996	0,00%						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			12	Sarana	17.576.773.707	9.630.073	4.541.936.479					-	4.551.566.552	0,00%	25,90%	4.551.566.552	0,00%						
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang dibangun			1	Unit	3.529.586.538		498.890.757					-	498.890.757,00	0,00%	14,13%	498.890.757	0,00%						
		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun			1	Unit	400.000.000		15.961.800					-	15.961.800	0,00%	3,99%	15.961.800	0,00%						
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Di bangun			1	Unit	250.000.000							-		0,00%	0,00%		0,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan			10	Paket	210.880.000			45.207.000					-	45.207.000	0,00%	21,44%			45.207.000	0,00%			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			10	Puskesmas	38.488.816.823			2.984.887.808						13.309.378.971	0,00%	34,81%			13.309.378.971	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			9581	org	75.000.000	2.199		58.099.500					2.199	58.099.500	22,95%	74,80%			58.099.500	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			9145	org	202.797.250	2.118		4.500.000					2.118	142.733.000	23,18%	70,38%			142.733.000	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			8710	or	157.413.900	2.000		9.000.000					2.000	110.540.100	22,96%	70,22%			110.540.100	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			36178	org	65.560.750	9.331		51.493.800					9.331	51.493.800	25,79%	78,54%			51.493.800	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			60.968	org	61.775.000											0,00%	0,00%				0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			200094	org	53.050.000	47.709		17.180.000					47.709	21.680.000	22,82%	40,83%			21.680.000	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			15341	org	28.849.900	5.848		7.500.000					5.848	7.500.000	38,12%	25,13%			7.500.000	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			72492	org	100.000.000	12.915		47.132.300					12.915	47.132.300	17,82%	47,13%			47.132.300	0,00%			

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					7			8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/8 x100%			
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			3815 org	623.232.000	1.221	4.500.000		5.800.000					1.221	10.100.000	32,01%	1,62%			10.100.000	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar			503 org	83.670.000	1.054			18.750.000					1.054	18.750.000	209,54%	22,41%			18.750.000	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			8034 org	1.146.012.300	1.266			25.420.000					1.266	25.420.000	15,76%	2,22%			25.420.000	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			9228 org	439.557.500	2.370	5.400.000		275.000.000					2.370	280.400.000	25,68%	63,79%			280.400.000	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar			1 Dokumen	558.440.000		88.892.246		101.919.823					-	181.812.069	0,00%	34,35%			181.812.069	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1 Dokumen	397.437.250		65.548.646		197.719.100					-	263.267.746	0,00%	66,24%			263.267.746	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			4 Dokumen	448.108.800				86.950.000					-	66.950.000	0,00%	19,40%			66.950.000	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan			1 Dokumen	293.074.530				120.975.500					-	120.975.500	0,00%	41,28%			120.975.500	0,00%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan			1 Dokumen	349.574.400		105.400.000		51.775.200					-	157.175.200	0,00%	44,86%			157.175.200	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyislahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			8 Orang	54.746.800											0,00%	0,00%				0,00%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			1 Dokumen	862.628.800		41.700.000		260.808.700					-	302.508.700	0,00%	35,07%			302.508.700	0,00%		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan						
					5		6		7		8		9		10		11		12				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat			1	Dokumen	31.380.142.202	2.119.683.713							11.132.381.158	0,00%	35,48%	11.132.381.158	0,00%								
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1	Paket	39.200.000									0,00%	0,00%		0,00%								
		Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat			1	Dokumen	29.999.200									0,00%	0,00%		0,00%								
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1	Dokumen	12.805.000									0,00%	0,00%		0,00%								
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)			1	Laporan	8.550.000									0,00%	0,00%		0,00%								
		Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)			1	Unit	714.413.700	83.073.000							229.682.900	0,00%	32,15%	229.682.900	0,00%								
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1468	org	100.000.000								5.850.000	0,00%	5,85%	5.850.000	0,00%								
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			609	org	47.457.500	9.000.000							35.725.000	0,00%	75,28%	35.725.000	0,00%								
		Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria			2	org	87.717.875								11.220.000	0,00%	18,57%	11.220.000	0,00%								
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	Dokumen	53.702.000									0,00%	0,00%		0,00%								

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi			12	sarana	185.772.000			33.109.400	-	-	-	33.109.400	0,00%	17,82%		33.109.400	0,00%						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan			8	Dokumen	185.772.000			33.109.400				33.109.400	0,00%	17,82%		33.109.400	0,00%						
		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			103	Sarana	1.469.449.502	66.846.900		607.328.073	-	-	-	664.073.073	0,00%	45,50%		664.073.073	0,00%						
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya			18	Unit	51.124.000			22.500.000				22.500.000	0,00%	44,01%		22.500.000	0,00%						
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar			75	Unit	81.000.000			43.050.000				43.050.000	0,00%	53,15%		43.050.000	0,00%						
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator rasional mutu (INM) pelayanan kesehatan			11	Unit	1.111.838.302	20.070.000		487.690.073				507.780.073	0,00%	45,67%		507.780.073	0,00%						
		Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan			2	Dokumen	215.487.200	36.775.000		53.988.000				90.763.000	0,00%	42,12%		90.763.000	0,00%						

No	Sesaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan			117	Sarana	153.248.000		26.803.200	15.300.000	-	-	-	41.803.200	0,00%	27,28%		41.803.200	0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)			3	Dokumen	153.248.000		26.503.200	15.300.000				41.803.200	0,00%	27,28%		41.803.200	0,00%				
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan			50	Sarana	357.537.900		-	88.594.000	-	-	-	88.594.000	0,00%	24,78%		88.594.000	0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1	Dokumen	357.537.900		-	88.594.000				88.594.000	0,00%	24,78%		88.594.000	0,00%				
		Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M			4	Dokumen	139.499.800		-	39.000.000	-	-	-	39.000.000	0,00%	27,96%		39.000.000	0,00%				

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
s.d JUNI
Dinas Kesehatan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
							I		II		III		IV								8	9	10	11	12	13=12/7x100%
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 %	188.640.000	25.249.297	50.037.000	-	-	75.286.297	39,91%	75.286.297	0,00%	DINAS KESEHATAN										
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	-	100 %	188.640.000	25	25.249.297	50.037.000	-	-	25	75.286.297	25,00%	39,91%	75.286.297	0,00%								
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT, LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A)	Jumlah pelayanan kesehatan (bulan)			12 bulan	188.640.000	3	25.249.297	2	50.037.000	5	75.286.297	41,67%	39,91%	75.286.297										
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,67%	39,91%									
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
							188.640.000	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					75.286.297	41,67%	39,91%											
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 %	922.500.000	313.440.364	293.754.578	-	-	607.194.942	65,82%	862.613.448	0,00%	DINAS KESEHATAN										
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	-	100 %	922.500.000	25	313.440.364	293.754.578	-	-	25	607.194.942	25,00%	65,82%	862.613.448	0,00%								
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Medang kampai)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			12 bulan	922.500.000	3	313.440.364	2	293.754.578	5	607.194.942	41,67%	65,82%	607.194.942	0,00%									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	-	-	12 sarana	541.032.000	-	115.121.753	-	-	115.121.753	0,00%	21,28%	115.121.753	0,00%										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			10 puskesmas	541.032.000	10	115.121.753	-	-	10	115.121.753	100,00%	21,28%	115.121.753	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	655 orang	9.240.000	117	2.310.000			117	2.310.000	17,86%	25,00%	2.310.000	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	649 orang	35.680.000	105	16.640.000			105	16.640.000	16,18%	46,64%	16.640.000	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3892 orang	16.500.000							0,00%	0,00%		0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	309 orang	2.400.000	75	1.125.000			75	1.125.000	24,27%	46,88%	1.125.000	0,00%									

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
							I		II		III		IV			13=12/7x100%			14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1.804.279.500	428.554.515	517.357.695					945.912.210	52,43%	84.990.000	0,00%	DINAS KESEHATAN						
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)			100 %	1.804.279.500	25 428.554.515	517.357.695			25	945.912.210	25,00%	52,43%	84.990.000	0,00%							
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			12 bulan	1.804.279.500	3 428.554.515	2 517.357.695			5	945.912.210	41,67%	52,43%	945.912.210	0,00%							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP			12 sarana	931.103.000		98.365.000				98.365.000	0,00%	10,56%	98.365.000	0,00%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			10 puskesmas	931.103.000		98.365.000				98.365.000	0,00%	10,56%	98.365.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1002 orang	22.100.000	265	1.950.000			265	1.950.000	26,45%	8,82%	1.950.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			994 orang	64.000.000	271	21.750.000			271	21.750.000	27,26%	33,98%	21.750.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6960 orang	30.000.000							0,00%	0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			979 orang	20.000.000	256	5.900.000			256	5.900.000	26,15%	29,50%	5.900.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1404 orang	5.000.000	276	1.750.000			276	1.750.000	19,66%	35,00%	1.750.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	258.097.000		400.000				400.000	0,00%	0,15%	400.000	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	25.000.000		4.700.000				4.700.000	0,00%	18,80%	4.700.000	0,00%							
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	42.100.000		7.095.000				7.095.000	0,00%	16,85%	7.095.000	0,00%							
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	154.250.000		32.700.000				32.700.000	0,00%	21,20%	32.700.000	0,00%							
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	154.352.000		6.045.000				6.045.000	0,00%	3,92%	6.045.000	0,00%							
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	10.275.000							0,00%	0,00%		0,00%							

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampal Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
							I		II		III		IV								12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 %	2.454.374.960	719.007.392	848.585.930	-	-	1.567.593.322	63,87%	1.935.454.976	0,00%	DINAS KESEHATAN												
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)	-	-	100 %	2.454.374.960	25 719.007.392	848.585.930	-	-	25 1.567.593.322	25,00%	63,87%	1.935.454.976	0,00%												
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sungai Sembilan)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			12 bulan	2.454.374.960	3 719.007.392	2 848.585.930			5 1.567.593.322	41,67%	63,87%	1.567.593.322	0,00%												
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP	-	-	12 sarana	821.046.000	-	165.480.827	-	-	165.480.827	0,00%	20,15%	165.480.827	0,00%												
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			10 puskesmas	821.046.000	10 -	165.480.827	-	-	10 165.480.827	100,00%	20,15%	165.480.827	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	1538 orang	18.000.000	281	9.000.000			281 9.000.000	18,27%	50,00%	9.000.000	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	1527 orang	3.600.000	239			239 -	15,65%	0,00%	-	0,00%													
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	9480 orang	18.750.000					- -	0,00%	0,00%	-	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	583 orang	9.300.000	149	4.950.000			149 4.950.000	25,56%	53,23%	4.950.000	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	1616 orang	2.250.000	176	750.000			176 750.000	10,89%	33,33%	750.000	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	1 Dokumen	279.561.000		9.750.000			- 9.750.000	0,00%	3,49%	9.750.000	0,00%												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	1 Dokumen	15.750.000		7.200.000			- 7.200.000	0,00%	45,71%	7.200.000	0,00%												
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	1 Dokumen	33.120.000		5.250.000			- 5.250.000	0,00%	15,85%	5.250.000	0,00%												
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	1 Dokumen	122.250.000		39.600.000			- 39.600.000	0,00%	32,39%	39.600.000	0,00%												
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	1 Dokumen	131.994.000		34.680.827			- 34.680.827	0,00%	26,27%	34.680.827	0,00%												
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan	300.000					- -	0,00%	0,00%	-	0,00%												

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
							I		II		III		IV			12			13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17										
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	120 orang	58.200.000	96			16.950.000			96	16.950.000	80,00%	29,12%	16.950.000		0,00%						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 orang	600.000							-	-	0,00%	0,00%	-		0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	19.800.000				5.250.000			-	5.250.000	0,00%	26,52%	5.250.000		0,00%						
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	107.100.000				32.100.000			-	32.100.000	0,00%	29,97%	32.100.000		0,00%						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	471.000							-	-	0,00%	0,00%	-		0,00%						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita				915.000															0,00%				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri				915.000																0,00%			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	915.000							-	-	0,00%	0,00%	-		0,00%						
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		76,62%	52,90%											
												Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah											
												1.733.074.149		76,62%	52,90%											
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Tinggi	Rendah											
		Puskesmas Bumi Ayu																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1.111.875.000	306.146.159			353.096.046				659.242.205	59,29%		1.028.574.265		0,00%	DINAS KESEHATAN					
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)			100 %	1.111.875.000	25	306.146.159		353.096.046			25	659.242.205	25,00%	59,29%	1.028.574.265		0,00%						
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bumi Ayu)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			12 bulan	1.111.875.000	3	306.146.159	2	353.096.046			5	659.242.205	41,67%	59,29%	659.242.205								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP			12 sarana	736.865.000				166.146.030				166.146.030	0,00%	22,55%	166.146.030		0,00%						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			10 puskesmas	736.865.000				166.146.030				166.146.030	0,00%	22,55%	166.146.030		0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1160 orang	4.260.000	235			1.065.000			235	1.065.000	20,26%	25,00%	1.065.000		0,00%						

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Sampal Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan																			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri						7.975.000																																									
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1	Dokumen		7.975.000																																							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				40,55%	44,53%																													
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				40,55%	44,53%						1.856.716.000																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																													
		Puskesmas Bukit Timah																																																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						100 %		609.500.000		189.539.512		214.957.448											404.496.960		66,37%		594.059.492		0,00%	DINAS KESEHATAN																	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)						100 %		609.500.000	25	189.539.512		214.957.448											404.496.960	25,00%	66,37%		594.059.492		0,00%																		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bukit Timah)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD						12 bulan		609.500.000	3	189.539.512		214.957.448											404.496.960	41,67%	66,37%		404.496.960																				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP						12 sarana		531.249.000				80.523.766											80.523.766	0,00%	15,16%		80.523.766		0,00%																		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP						10 puskesmas		531.249.000	10			80.523.766											80.523.766	100,00%	15,16%		80.523.766		#REF!																		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						516 orang		6.600.000	92			1.650.000											1.650.000	17,83%	25,00%		1.650.000		0,00%																		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						511 orang		6.900.000	78															-	15,26%	0,00%				0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						2917 orang		17.250.000				4.875.000												4.875.000	0,00%	28,26%		4.875.000		0,00%																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						404 orang		4.350.000	79			1.200.000											1.200.000	19,55%	27,59%		1.200.000		0,00%																		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Menderita HIV yang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						571 orang		5.400.000	118			1.200.000											1.200.000	20,67%	22,22%		1.200.000		0,00%																		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1 Dokumen		187.900.000				12.390.000												12.390.000	0,00%	6,59%		12.390.000		0,00%																	

No	Sasaran RKPd	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	1471 orang	8.500.000	156			3.300.000					156	3.300.000	10,61%	38,82%			3.300.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	2267 orang	4.000.000	311			1.250.000					311	1.250.000	13,72%	31,25%			1.250.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	1 Dokumen	333.718.000				100.000					-	100.000	0,00%	0,03%			100.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	1 Dokumen	27.000.000				3.900.000					-	3.900.000	0,00%	14,44%			3.900.000						
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	1 Dokumen	36.450.000				9.100.000					-	9.100.000	0,00%	24,97%			9.100.000						
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	1 Dokumen	226.850.000				39.500.000					-	39.500.000	0,00%	17,41%			39.500.000						
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	1 Dokumen	175.770.000				26.286.000					-	26.286.000	0,00%	14,95%			26.286.000						
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	1 Dokumen	10.275.000									-	-	0,00%	0,00%			-						
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan	500.000									-	-	0,00%	0,00%			-						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	303 orang	6.000.000	203			600.000					203	600.000	67,00%	10,00%			600.000						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	1 orang	500.000				100.000					-	100.000	0,00%	20,00%			100.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	1 Dokumen	26.400.000				5.600.000					-	5.600.000	0,00%	21,21%			5.600.000						
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	1 Dokumen	91.000.000				7.650.000					-	7.650.000	0,00%	8,41%			7.650.000						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	1 Dokumen	5.226.000									-	-	0,00%	0,00%			-						
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,79%	36,56%												
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		60,79%	Sangat Rendah												
													3.570.229.000	1.305.269.783	60,79%	36,56%												
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Sangat Rendah												
		Puskesmas Bukit Kayu Kapur																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100 %	1.640.538.650	335.015.890			432.198.781					100	-	46,77%				998.900.667			0,00%	DINAS KESEHATAN		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD e/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD e/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
							I		II		III		IV								12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (%)			100 %	1.640.538.650	25	335.015.890		432.198.781		-	-	25	767.214.671	25,00%	46,77%		998.900.667		0,00%					
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			12 bulan	1.640.538.650	3	335.015.890		432.198.781				5	767.214.671	41,67%	46,77%		767.214.671							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP			12 sarana	629.410.000				115.842.998		-	-		115.842.998	0,00%	18,41%		115.842.998		0,00%					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			10 puskesmas	629.410.000	10			115.842.998		-	-	10	115.842.998	100,00%	18,41%		115.842.998		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			962 orang	12.980.000	217			6.945.000				217	6.945.000	22,56%	53,59%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			955 orang	21.950.000	179							179		18,74%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5822 orang	12.750.000										0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			354 orang	21.000.000	74			6.300.000				74	6.300.000	20,90%	30,00%		6.300.000		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1191 orang	12.000.000	157			4.875.000				157	4.875.000	13,18%	40,63%		4.875.000		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	192.966.000				3.900.000					3.900.000	0,00%	2,02%		3.900.000		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	16.050.000				5.550.000					5.550.000	0,00%	34,58%		5.550.000		0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	26.725.000				6.300.000					6.300.000	0,00%	23,57%		6.300.000		0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	98.625.000				25.350.000					25.350.000	0,00%	25,70%		25.350.000		0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	101.364.000				32.952.998					32.952.998	0,00%	32,50%		32.952.998		0,00%					
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	750.000										0,00%	0,00%				0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			73 orang	1.500.000	50			150.000				50	150.000	68,49%	10,00%		150.000		0,00%					

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1	orang	4.050.000					1.050.000					1.050.000	0,00%	25,93%			1.050.000	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1	Dokumen	3.600.000					900.000					-	900.000	0,00%	25,00%			900.000	0,00%				
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	Dokumen	102.930.000					21.570.000						21.570.000										
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1	Dokumen	170.000											-	-	0,00%	0,00%			-	0,00%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita					1.125.000																			0,00%		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri					1.125.000																				0,00%	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1	Dokumen	1.125.000											-	-	0,00%	0,00%			-	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		76,49%	38,88%										
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah										
								2.271.073.650																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		863.057.669	76,49%	38,88%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Tinggi	Rendah										